

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP KEGIATAN INVESTASI
BIDANG KONSTRUKSI DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

**Dian Amelia, S.H., M.H
Upita Anggunsuri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

No.Reg : 5/PK-II/III/2024

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP KEGIATAN
INVESTASI BIDANG KONSTRUKSI DI KOTA PADANG**

Ahmad Fadli

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap kegiatan investasi di bidang konstruksi di Kota Padang. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP, mengevaluasi efektivitas pengawasan tersebut, dan menganalisis dampaknya terhadap kelancaran dan keberlanjutan investasi di sektor konstruksi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme perjanjian Jasa Konstruksi 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kegiatan Investasi Bidang Konstruksi di Kota Padang. 3) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengawasan kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: 1) Mekanisme perjanjian jasa konstruksi ada beberapa tahapan, proses dimulai dengan pemahaman kebutuhan proyek oleh pemilik konstruksi pada tahap pra-penawaran, diikuti dengan penyusunan dokumen tender dan mengundang kontraktor untuk mengajukan penawaran. Kontraktor kemudian mengajukan penawaran yang mencakup berbagai aspek proyek. Pemilik konstruksi mengevaluasi penawaran, termasuk pertimbangan biaya, pengalaman, dan kesesuaian dengan persyaratan tender. Setelah evaluasi, kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk menetapkan rincian kontrak, termasuk harga, jadwal, dan kondisi-kondisi lainnya, yang kemudian ditandatangani dalam kontrak resmi. 2) Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Bidang Konstruksi di Kota Padang menggunakan cara pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan Konstruksi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang tidak menggunakan cara pengawasan secara langsung, karena DPMPTSP Kota Padang sudah merasa cukup melakukan pengawasan melalui pengawasan secara tidak langsung. 3) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengawasan kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang adalah masih banyaknya pelaku usaha di sektor konstruksi yang belum memahami apa itu LKPM. Bagi pelaku usaha juga memiliki kendala yang dimana kendala tersebut Staff (pelaku usaha) perusahaan yang bertanggung jawab atas LKPM masih belum sepenuhnya memahami prosedur penyampaian LKPM secara daring melalui sistem OSS sehingga dapat menghambat kinerja DPMPTSP Kota Padang dalam melakukan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan pembinaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pendampingan LKPM agar pelaku usaha baik itu di sektor konstruksi maupun di sektor lainnya mengetahui akan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Kata kunci: Investasi, Pengawasan, DPMPTSP